RENCANA STRATEGIS

DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK LUAR NEGERI KEMENKO POLHUKAM RI

TAHUN 2020-2024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Pendahuluan 1
1.1.1 Capaian Tahun 2015-2019 1
1.1.2 Isu Strategis Tahun 2020-2024 10
1.2 Potensi dan Permasalahan 16

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN 20
2.1 Visi, Misi dan Tujuan 20
2.2 Sasaran Strategis 21

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN 23
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 23
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kemenko Polhukam ... 26
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidkor Pollugri 27
3.4 Kerangka Regulasi 28
3.5 Kerangka Kelembagaan 28

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 30
4.1 Indikator, Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 30

BAB V PENUTUP 32

LAMPIRAN
1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri
2. Matriks Target Kinerja dan Pendanaan Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2020 - 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM
1.1.1 CAPAIAN TAHUN 2015-2019

A. MENINGKATNYA KUALITAS DIPLOMASI DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI INDONESIA

Gambar 1.1 Capaian Meningkatnya Kualitas Diplomasi dan Kerja Sama Luar Negeri Indonesia Tahun 2019

Indikator 1 : Jumlah Kerja Sama Bilateral dan Regional Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dengan Negara Lain yang Ditindaklanjuti dalam Mendukung Suksesnya Diplomasi Indonesia

a. Peningkatan dan pengembangan kerja sama bilateral bidang politik, hukum dan keamanan di kawasan Asia, Pasifik dan Afrika
   1. Rekomendasi program kerja sama RI-Myanmar bidang pertahanan sebagai salah satu upaya tindak lanjut dari program kerja sama RI-Myanmar di bidang politik, hukum dan keamanan melalui koordinasi dengan Kemlu, Kemhan dan Kedutaan Besar Myanmar di Indonesia;

2. Peningkatan hubungan bilateral RI-Jepang khususnya di bidang hukum dan keamanan melalui pembentukan mekanisme Forum Konsultasi Bilateral RI-Jepang di tingkat Menteri Koordinator dan tindak lanjut kerja sama *Transfer Defence Equipment and Technology* antara Jepang dan Indonesia;
3. Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan hubungan dan kerja sama RI-Thailand dalam mengatasi masalah-masalah kejahatan lintas batas di kawasan melalui pertemuan dengan *National Security Council Thailand* (NSC) dan *United Nations Office on Drugs and Crime Regional Representatives for Asia and Pacific* (UNODC) Bangkok, Thailand pada 1 dan 2 Agustus 2019;
4. Peningkatan Kerja Sama RI-Australia di bidang hukum dan keamanan pada Pertemuan *Australia-Indonesia Ministerial Council Meeting on Law and Security* (MCM RI-Australia) ke-6 pada 8 November 2019.

b. Kerja sama regional bidang politik, hukum dan keamanan di kawasan Asia, Pasifik dan Afrika
1. Rekomendasi sinergi program kerja *United Nations Development Program* (UNDP) di bidang penanggulangan radikalisme, ekstrimisme dan terorisme dengan Kementerian/Lembaga terkait di bawah koordinasi Kemenko Polhukam dan Kemenko PMK;
2. Tindak lanjut koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian peningkatan bantuan/komitmen kerja sama Pemerintah Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan dalam rangka membangun dukungan negara-negara Pasifik terhadap kedaulatan RI.
3. Pengukuhan kedaulatan wilayah NKRI melalui kerja sama bilateral dan regional di berbagai bidang, khususnya pertahanan dan keamanan yang diwujudkan dengan rekomendasi penyusunan *Master Plan Geopark* Natuna dan tindak lanjut upaya revisi tata ruang Kepulauan Natuna dan Rencana Penetapan *UNESCO Global Geopark* kepada Kementerian/Lembaga terkait.

c. Peningkatan dan pengembangan kerja sama bilateral bidang politik, hukum dan keamanan di kawasan Amerika dan Eropa:
1. Forum Konsultasi Bilateral Bidang Keamanan antara Menko Polhukam dengan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia pada 13 Februari 2020 di Moskow, Rusia menghasilkan kesepakatan, antara lain rekomendasi kepada K/L terkait untuk segera menyelesaikan *pending* MoU/*Agreement* yang telah berjalan selama ini antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Rusia, khususnya dalam hal Kerja Sama Pertahanan melalui pembelian Pesawat Sukhoi SU-35, Kerja Sama Pemberantasan

Narkoba, Kerja Sama di bidang Penanggulangan Bencana Alam (*Disaster Management*), serta Percepatan Proses Penandatanganan Kerja Sama *Mutual Legal Assistant* (MLA) dan Ekstradisi dan penyelesaian *draft* kerja sama simplifikasi Visa;

2. Rekomendasi kepada TNI AL untuk segera menyusun kerangka waktu (*time frame*) program jangka pendek melalui penyusunan RAB mengenai survei mandiri serta rekomendasi kepada Kementerian Luar Negeri untuk segera menyusun teknis prosedur berupa *agreement* mengenai *Joint Survey* guna menyelesaikan masalah Penanganan Kerangka Kapal AS USS Houston.;
3. Hasil monitoring dan evaluasi Tim Teknis *Working Group USPC* secara rutin setiap tahun ketiga wilayah di 3 (tiga) Indonesia, yaitu Jawa Barat, NTT, dan Jawa Timur antara lain:
   - ✓ *Pilot Project* Program USPC di Provinsi NTT telah memberikan manfaat positif bagi daerah dan belum ditemukan adanya aktivitas yang merugikan pemerintah Indonesia. Untuk itu, forum sepakat untuk mengusulkan kepada pimpinan K/L masing-masing agar pilot project program USPC di Provinsi NTT ditingkatkan menjadi program permanen.
   - ✓ Keputusan penetapan program USPC di Provinsi NTT ini akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi K/L terkait. Penetapan ini akan dicantumkan dalam amandemen *MoU* dan *Implementing Arrangement* antara Pemerintah RI dan AS terkait Program *USPC* di Indonesia.
4. Rekomendasi atas Permohonan Pemeritah Turki kepada Pemerintah RI terkait *Arrest Warrant* dan Deportasi Warga Negara Turki a.n. Matin Guven meliputi hal-hal sebagai berikut:
   - ✓ Melakukan investigasi dan verifikasi lebih lanjut dengan menggunakan semua sumber data keimigrasian untuk memastikan keberadaan Matin Guven yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan selanjutnya akan menyampaikan laporan kepada K/L terkait dalam waktu satu minggu.
   - ✓ Mempertimbangkan bahwa Indonesia akan mendapatkan permohonan serupa di masa yang akan datang, maka dipandang perlu untuk menyusun suatu mekanisme baku yang menjadi pedoman bagi K/L terkait dalam menyikapi dan menindaklanjuti isu tersebut.
   - ✓ Mempertimbangkan bahwa masalah ini harus ditangani secara lintas sektor, maka perlu dibentuk gugus tugas yang

akan bekerja sesuai dengan kebutuhan dan dalam satu *time frame* dengan BIN sebagai *leading sector*.

5. Rekomendasi terkait Permohonan Pemerintah AS untuk Mencari Kerangka Jenazah Prajurit AS di Wilayah Morotai diantaranya meminta K/L terkait dibawah koordinasi Kemenko Polhukam untuk hadir dalam rencana pertemuan dengan pihak DPAA (*U.S. Defense Prisoner of War/Missing in Action Accounting Agency)*, serta untuk meminta *DPAA* agar dapat memberikan data yang akurat terkait dengan jumlah tentara AS yang diterjunkan dalam Perang Morotai, daerah operasi militer dan rekapitulasi korban tewas.

Indikator 2 : Jumlah Rekomendasi terkait sinkronisasi, sinergi dan pengendalian Kerja Sama Multilateral dan Organisasi Internasional dalam Mendukung Suksesnya Diplomasi Indonesia

1. Rekomendasi Antisipasi Pengungsi dari Luar Negeri; bahwa Pemri perlu memfokuskan diri pada kerja sama yang lebih konkrit terkait upaya pembentukan mekanisme *early warning dan early detection* di lingkungan *Bali Process* pada umumnya dan ASEAN pada khususnya. Oleh karena itu, inisiatif untuk membentuk mekanisme *information sharing* di antara negara-negara anggota *Bali Process* bisa terus didorong sebagai sarana bertukar informasi antar negara yang efektif.
2. Pokok-Pokok Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) Membahas Posisi Dasar dan Arah Kebijakan Diplomasi Siber Indonesia adalah sebagai berikut:
   a) Pertemuan berhasil merumuskan *zero draft* posisi dasar diplomasi siber Indonesia. Draft ini diharapkan dapat disempurnakan lebih lanjut dan akan ditindaklanjuti oleh BSSN. *Zero draft* ini nantinya diharapkan dapat menjadi rujukan bagi semua K/L dalam memahami posisi dasar Indonesia pada saat melakukan interaksi dengan komunitas internasional.
   b) Mekanisme koordinasi di tingkat nasional, dalam format *clearing house*, dapat dipertimbangkan pendiriannya dalam upaya mengoptimalkan dan saling memutakhirkan antar K/L terkait isu dan kepentingan siber masing-masing. Forum regular ini dapat dilakukan di level *working group*, maupun di level yang lebih tinggi.
   c) Forum terlihat memberikan penekanan terhadap peran BSSN dalam melakukan fungsi koordinasi ditingkat nasional. Untuk itu, kiranya penguatan peran BSSN ditingkat nasional perlu terus didorong. Strategi siber nasional perlu segera dikeluarkan untuk semakin memperkuat diplomasi siber Indonesia di tataran

internasionalm termasuk diantaranya dalam upaya pembentukan norma dan perilaku di ruang siber.

d) Guna mengoptimalkan tugas dan fungsinya, BSSN perlu melakukan sosialisasi kepada semua K/L, terutama terkait berbagai kapasitas maupun jasa perbantuan TIK yang dapat diberikannya.

e) Terkait dengan situs-situs internet yang bermasalah, kiranya dapat segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum, baik terhadap pemiliki akun maupun keberlangsungan akunnya, terutama bagi yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Surat Deputi Bidang Politik Luar Negeri Nomor B-156/LN.03.00/9/2019 kepada Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham tanggal 6 September 2019 meminta Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham mengoordinasikan pengumpulan dan penyatuan data nasional serta sebagai koordinator sekaligus otorisator pengumpulan dan penyatuan database dengan aplikasi data tetap berada di K/L terkait masing-masing. Pokok-pokok dalam surat tersebut adalah sebagai berikut:

   a) Data terkait IP-GRTKF/SDGPTEBT masih parsial dan tersebar di beberapa K/L. Rapat menyepakati untuk melakukan penyatuan database (*data sharing*) tersebut berupa meta data.

   b) Akses *database* bersifat tertutup dan terbatas, serta akan dibuatkan level pemberian akses bagi para pengguna.

   c) Dalam jangka panjang, Indonesia perlu menyusun aturan, format atau standar baku dan metodologi yang akan digunakan dalam pengumpulan dan penyusunan *database*, serta mekanisme sistem yang dapat menghubungkan database antar K/L dengan melibatkan instansi terkait.

   d) Perlu disusun payung hukum tentang pengelolaan IP-GRTKF/SDGPTEBT.

   e) Meyepakati kiranya Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dapat menjadi *focal point* dalam mengoordinasikan pengumpulan dan penyatuan data nasional.

Indikator 3 : Jumlah Penanganan Permasalahan Bidang Politik Luar Negeri

Penanganan permasalahan bidang politik luar negeri di kawasan Asia, Pasifik dan Afrika pada tahun 2019 antara lain:

1. Koordinasi dan sinkronisasi upaya verifikasi, pendataan dan penanganan eks kelompok teroris beserta keluarganya yang berada di luar negeri yang dilakukan secara terbatas dengan BNPT, Kemlu, BIN dan anggota Satgas penanganan *Foreign Terrorist Fighters* (FTF) di bawah koordinasi BNPT;

2. Dukungan terhadap Penyusunan Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Menghadapi Pelanggaran Kedaulatan RI di Wilayah *Undelimited Waters* melalui rapat koordinasi di Kemenko Polhukam pada 29 Mei 2019 dan penyampaian rekomendasi Kemenko Polhukam kepada Kementerian/Lembaga terkait mengenai pedoman/SOP dalam menghadapi pelanggaran kedaulatan RI di wilayah *undelimited waters* pada bulan Juni 2019 penyampaian Pedoman Penegakan Hukum di Wilayah Tumpang Tindih pada bulan Juli 2019*;*
3. Tindak lanjut penyelesaian *unresolved segments* perbatasan darat RI-Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) pada segmen Noel Besi-Citrana dan Bijael Sunan-Oben melalui forum *Senior Official Consultation* (SOC), pendekatan politis dengan *Chief Negotiatior* RDTL, Xanana Gusmao oleh Menko Polhukam serta koordinasi intensif dengan Kemlu dan Kementerian/Lembaga terkait untuk memantau perkembangan tindak lanjut penyelesaian pembagian perbatasan dengan pihak RDTL;

   Melaksanakan rapat koordinasi dan kunjungan kerja bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka peningkatan koordinasi dan sinergi Kementerian/Lembaga dalam penyelesaian permasalahan dan isu strategis kerja sama Asia, Pasifik dan Afrika, antara lain penyelesaian perbatasan, penanggulangan terorisme, penanganan *Foreign Terrorist Fighters* di kawasan, peningkatan kerja sama bilateral dengan mitra strategis Indonesia di bidang politik, hukum dan keamanan, serta isu terkait kerja sama di kawasan Asia, Pasifik dan Afrika lainnya.

Indikator 4 : Jumlah Implementasi *Blueprint APSC 2025*

1. Implementasi Blueprint APSC 2025 langkah aksi A.2.5.iv: 'Mendukung *ASEAN Intergovernmental Commissions on Human Rights* (AICHR) dalam melaksanakan mandatnya sesuai dengan Kerangka Acuannya'
2. Implementasi *Blueprint APSC 2025* langkah aksi B.1.2.vii: 'Melakukan tinjauan secara berkala mengenai inisiatif yang sudah ada agar sejalan dengan prioritas ADMM dan ADMM-Plus dengan isu-isu keamanan regional yang menjadi perhatian bersama'.
3. Implementasi Blueprint APSC 2025 langkah aksi B.6.1.iv: 'Mengintensifkan negosiasi antara ASEAN dan RRT untuk mengesahkan *Code of Conduct in the South China Sea* (CoC) secepatnya dan memastikan implementasinya secara penuh dan efektif'.

4. Implementasi *Blueprint APSC 2025* langkah aksi A.1.5: 'Peningkatan kesadaran masyarakat pada ASEAN'. Telah menyelenggarakan 4 kali kegiatan Diseminasi Informasi Masyarakat ASEAN yaitu:
   a. Tanggal 22 April 2019 di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Malang, Jawa Timur. Kegiatan diseminasi ini mengambil tema "Masyarakat ASEAN: Tantangan Politik dan Keamanan di Kawasan" dan melibatkan Pusat Studi ASEAN (PSA) UMM dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memaparkan ancaman narkoba dan upaya penanggulangannya di tingkat nasional dan ASEAN;
   b. tanggal 23 Agustus 2019 di Universitas Sriwijaya (Unsri), Palembang, Sumatera Selatan. Pada kegiatan diseminasi ini kami mengambil tema "Masyarakat ASEAN: Tantangan Politik dan Keamanan di Kawasan" dan melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk memaparkan ancaman radikalisme, violent extremism, dan terorisme serta upaya penanggulangannya di tingkat nasional dan ASEAN;
   c. tanggal 23 September 2019 di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, DIY. Pada kegiatan diseminasi ini dan atas dasar permintaan universitas, kami mengambil tema "Krisis Kemanusiaan dalam Politik Internasional" yang utamanya berkaitan dengan isu pengungsi Rohingya Rakhine State, Myanmar. Kegiatan juga melibatkan narasumber dari *think tank* dan akademisi yaitu National Program Officer JRS Indonesia dan Ketua Program Studi Hubungan Internasional UII;
   d. tanggal 12 Desember 2019 di Universitas Palangka Raya (UPR), Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Kegiatan diseminasi mengambil tema "Masyarakat ASEAN: Tantangan Politik dan Keamanan di Kawasan" dan melibatkan Kementerian Luar Negeri untuk memaparkan perkembangan kerja sama ASEAN utamanya di bidang politik, hukum, dan keamanan, serta Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional untuk membahas Ketahanan Nasional utamanya di daerah perbatasan.
5. Selain itu, Kemenko Polhukam c.q. Deputi Bidkoor Pollugri juga mengimplementasikan langkah aksi ini dengan memenuhi berbagai undangan kuliah umum untuk memaparkan perkembangan kerja sama ASEAN di bidang politik dan keamanan. Kemenko Polhukam c.q. Deputi Bidkoor Pollugri akan terus melaksanakan kegiatan ini sebagai bagian program rutin Asdep Koordinasi Kerma ASEAN dengan melibatkan Pusat Studi ASEAN (PSA) dan *focal point* nasional badan sektoral ASEAN untuk isu-isu yang menjadi prioritas baik di tingkat nasional dan regional.

6. Implementasi *Blueprint APSC 2025* langkah aksi B.1.1.ii: 'Meningkatkan peran Dewan Masyarakat Polkam ASEAN (APSC *Council*) dan Ketuanya dengan cara lebih menfokuskan pada isu-isu substantif dan strategis serta menangani isu-isu lintas sektoral dan lintas pilar yang berada dalam lingkupnya secara efektif'.

B. TERWUJUDNYA DAYA DUKUNG MANAJEMEN UNIT ORGANISASI YANG BERKUALITAS

Gambar 1.2 Capaian Terwujudnya Daya Dukung Manajemen Unit Organisasi yang Berkualitas Tahun 2019

Tabel 1.1 Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2015-2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya Kualitas Diplomasi dan Kerjasama Luar Negeri	Persentase kerjasama Luar Negeri Indonesia dengan Negara lain yang ditindak lanjuti dan berdampak kepada Indonesia	90%	90 %	100%	100%	100%
	Persentase Diplomasi Indonesia yang sukses	90%	90%	100%	100%	100%
	Jumlah permasalahan antar Negara yang teredam	2	3	4	4	4
	Implementasi Blueprint APSC 2025	3	4	4	7	7

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terwujudnya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas	Persentase penurunan jumlah temuan	n/a	50	100	n/a	n/a
	Persentase realisasi penyerapan anggaran	n/a	94	99.63	99.15	87,12
	Nilai akuntabilitas kinerja	n/a	70	73.13	75.53	76,08

1.1.2 ISU STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Aspek Keamanan

Indonesia saat ini dihadapkan pada dinamika lingkungan strategis yang berpengaruh pada aspek keamanan nasional dan global. Dalam lingkup global, tren persaingan negara-negara maju di kawasan Asia, Amerika dan Eropa, konflik di Timur Tengah serta sengketa maritim, khususnya di kawasan Asia Pasifik juga menjadi tantangan dalam menjaga dan memelihara keamanan global. Di samping itu, globalisasi membuat pergerakan manusia antar negara menjadi mudah, yang mengakibatkan migrasi yang dilakukan WNI ke luar negeri pun terus meningkat sehingga juga berpotensi meningkatkan permasalahan WNI di luar negeri. Kompleksitas masalah yang dihadapi WNI beragam sehingga diperlukan upaya intens untuk memberikan perlindungan kepada WNI di manapun ia berada.

Selain melindungi warganya, negara juga berkewajiban menjaga kedaulatannya dari berbagai ancaman. Dalam aspek kewilayahaan, Indonesia memiliki sengketa perbatasan yang perlu segera diselesaikan, khususnya batas maritim dengan sembilan negara. Dalam hal ini, pemerintah perlu secara intensif berdiplomasi untuk menjaga kedaulatan wilayahnya sebagai negara kepulauan.

Di samping itu, Indonesia juga rentan menerima gangguan keamanan yang berasal dari dalam dan luar negeri dari aktor non-pemerintah seperti separatisme, radikalisme, ekstremisme berbasis kekerasan, terorisme, penyelundupan narkoba, *IUU Fishing,* dan kejahatan siber. Pemerintah pun terus berupaya memerangi ancaman-ancaman tersebut. Untuk itu, dalam menangani berbagai permasalahan di sektor keamanan koordinasi antar pemangku kepentingan mendesak untuk dilakukan. Akan tetapi, aparat keamanan sering kali beroperasi secara parsial dalam mengatasi ancaman. Hal ini membuat penanganan masalah sering kali belum memberikan dampak signifikan.

Aspek Kerjasama Pembangunan Internasional

Prioritas kebijakan bidang kerjasama pembangunan internasional saat ini adalah mendukung kerja sama pembangunan internasional dalam peningkatan perdagangan dan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dalam melaksanakan kebijakan tersebut, beberapa isu yang dihadapi antara lain:

- ✓ Penguatan pelaksanaan Kerja Sama Selatan Selatan dan Triangular (KSST) untuk mendukung peningkatan perdagangan dan investasi melalui pertukaran pengetahuan dan keahlian.
- ✓ Dari sisi kelembagaan, diperlukan pembentukan mekanisme dan pengelolaan pendanaan satu pintu agar kerjasama pembangunan internasional dapat dilaksanakan secara integratif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi kepentingan nasional.
- ✓ Dari sisi pendanaan, perlunya pemanfaatan sumber-sumber dan mekanisme pendanaan baru, misalnya skema kredit ekspor melalui pelibatan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
- ✓ Dalam upaya penguatan pelaksanaan kerjasama pembangunan internasional, diperlukan pelibatan aktor non-pemerintah, terutama pihak swasta. Program-program kerjasama pembangunan internasional dapat membantu memperkenalkan produk dan teknologi yang dikembangkan perusahaan swasta, serta meningkatkan citra dan pengakuan terhadap branding di kawasan.

Di samping mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, secara politis kerja sama pembangunan internasional juga menjadi instrumen bagi Indonesia dalam meningkatkan kepercayaan negara-negara mitra kerja sama terhadap Indonesia. Hal ini menjadi penting tidak hanya bagi eksistensi Indonesia dalam pergaulan internasional namun juga dalam menggalang dukungan internasional terhadap kedaulatan NKRI, khususnya ketika dihadapkan pada ancaman kelompok yang melakukan internasionalisasi isu separatisme tehradap wilayah kedaulatan RI.

Aspek Sosial-Budaya

Citra positif Indonesia sangat penting dalam pergaulan internasional, sehingga Indonesia perlu melakukan diplomasi publik, termasuk kerja sama pembangunan internasional. Indonesia telah memiliki modal dalam melakukan diplomasi publik, yaitu negara demokrasi, masyarakat pluralistik dan toleran, ekonomi progresif, keanekaragaman budaya, kekayaan kuliner, serta diaspora Indonesia.

Untuk itu, diperlukan penguatan mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan diplomasi publik, mengingat ada banyak aktor yang terlibat. Selain itu, perlu ada kesepakatan tentang visi citra Indonesia yang akan ditampilkan kepada publik internasional. Sebagai negara dengan penduduk

Muslim terbesar di dunia, Indonesia juga perlu memperkuat kepemimpinan di dunia internasional melalui:

- Promosi nilai-nilai Islam yang moderat (Wasthyyah).
- Mempererat Ukhwah Islamiyah sesama Muslim di dunia, khususnya dengan terlibat aktif dalam organisasi internasional seperti, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan *The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of The Organisation of Islamic Cooperation* (COMCEC).
- Mendukung kemerdekaan Palestina. Dukungan dilakukan melalui peningkatan kerja sama pembangunan internasional, salah satunya bekerja sama dengan *Islamic Development Bank*.

Di samping itu, dalam mewujudkan citra positif Indonesia, diperlukan pula kepercayaan internasional terhadap kemampuan Indonesia dalam menjaga dan memelihara keamanan nasional dan global. Dalam hal ini, Indonesia perlu meningkatkan peran aktif dalam kerja sama pemeliharaan perdamaian dunia, serta memperkuat kapasitas pemangku kepentingan dalam upaya menjaga keamanan nasional.

Aspek Kepemimpinan dan Tata Kelola

Indonesia telah menjadi anggota aktif di 233 organisasi/forum internasional, seperti AIS, ASEAN, IORA, G20, dan PBB. Indonesia perlu memanfaatkan keanggotaannya untuk kepentingan nasional. Inisiatif dan posisi yang disampaikan Indonesia di dalam organisasi/forum internasional dengan mengedepankan total diplomacy, diplomasi maritim, diplomasi perdamaian, dan diplomasi kemanusiaan, dapat meningkatkan pengaruh Indonesia di tatanan internasional. Pada tingkat domestik, perlu penataan peran dan fungsi K/L dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri, khususnya peningkatan koordinasi antara Kementerian Luar Negeri dan K/L terkait agar Indonesia dapat segera menindaklanjuti kesepakatan atau komitmen di tingkat internasional. Selain itu, perlu pengaturan kewenangan Kepala Perwakilan dan pejabat perbantuan di Perwakilan RI sehingga dapat memperjelas hak dan kewajiban pejabat perbantuan di Perwakilan RI.

Selain hal tersebut diatas, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri telah memetakan isu strategis sebagaimana berikut:

A. Isu Strategis Bidang Kerja Sama Asia, Pasifik dan Afrika

1) Pengembangan kerja sama bilateral dan regional bidang politik, hukum, dan keamanan dengan negara-negara di kawasan Asia, Pasifik dan Afrika, dengan prioritas pada (i) pencegahan dan penanggulangan radikalisme, ekstremisme berbasis kekerasan, dan terorisme (CVE),

FTF dan FTF *Returnees*, kejahatan transnasional seperti IUU Fishing, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, kejahatan siber, dan kejahatan di wilayah maritim, (ii) kerja sama pertukaran data, informasi, dan *best practices* di bidang keamanan, dan (iii) kerja sama untuk mengimplementasikan ASEAN *Outlook on Indo-Pacific* (AOIP) yang merupakan posisi Indonesia di kawasan sebagai upaya menjawab tantangan dinamika perkembangan di kawasan Indo-Pasifik.

2) Penanganan tantangan dan permasalahan bidang politik luar negeri di kawasan Asia, Pasifik, dan Afrika antara lain (i) isu perbatasan, (ii) FTF dan FTF *Returnees,* (iii) Tenaga Kerja Indonesia/Pekerja Migran Indonesia, (iv) sengketa Laut China Selatan (LCS), (v) eskalasi ketegangan hubungan bilateral negara-negara di kawasan, (vi) persaingan dominasi dan perluasan pengaruh negara adidaya di kawasan, (vii) penyelesaian perundingan perbatasan maritim RI, dan (viii) kejahatan transnasional seperti IUU Fishing, kejahatan siber, dll.

3) Penguatan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di kawasan Asia, Pasifik, dan Afrika.

4) Penguatan integritas wilayah NKRI terutama dalam kaitannya dengan isu separatisme Papua yang kuat didukung oleh aktor pemerintah maupun non-pemerintah di kawasan Pasifik seperti Australia dan negara-negara Pasifik Selatan. Hal ini dilakukan salah satunya dengan peningkatan eksistensi, *leverage*, dan citra Indonesia yang diwujudkan melalui peningkatan kerja sama dan bantuan RI untuk negara-negara Pasifik (*Pacific Engagement*) dalam kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) baik dengan pemerintah maupun non-pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan maupun bidang lainnya.

5) Penyinergian pengelolaan tata ruang Kepulauan Natuna dalam konteks pengembangan pertahanan, potensi ekonomi, dan aset konservasi kemaritiman serta pengembangannya menjadi situs Global Geopark UNESCO guna menguatkan dan menegaskan kedaulatan RI di perbatasan yang bersinggungan dengan Laut China Selatan (LCS).

B. Isu Strategis Bidang Kerja Sama Amerika dan Eropa

Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pengembangan kerja sama bilateral di bidang politik, hukum, dan keamanan antara RI dengan negara-negara mitra strategis di kawasan Amerika dan Eropa, dengan prioritas peningkatan kerja sama keamanan non-tradisional seperti kontra terorisme (*counter terrorism*), *transnational crime*, penyalahgunaan narkotika, *cyber*

security, pertukaran data dan informasi bidang keamanan, serta kerja sama hukum dan ekstradisi.

Selain itu, di masa mendatang perlu diantisipasi potensi ancaman tradisional, seperti konflik antar negara/antar wilayah yang dapat mengancam stabilitas dan keamanan politik global. Hal ini menjadi penting jika konflik tersebut melibatkan negara-negara kunci di kawasan Amerika dan Eropa.

Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri, terutama Warga Negara Indonesia (WNI)/Diaspora Indonesia yang berada di negara-negara kawasan Amerika dan Eropa. Pemerintah RI memandang bahwa perlindungan terhadap WNI di luar negeri menjadi salah satu prioritas utama. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo, yaitu menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, yang juga merupakan salah satu pilar utama dari politik luar negeri RI yang bebas aktif.

Dalam upaya mewujudkan capaian terhadap tujuan di atas, maka dalam 5 (lima) tahun mendatang akan dikembangkan berbagai bentuk inisiatif kerja sama yang relevan. Berbagai bentuk kerja sama tersebut, antara lain Konsultasi Bilateral RI-Rusia yang diselenggarakan secara bergantian (di Indonesia dan di Rusia) setiap tahun, *Security Dialog* RI-Turki yang rencananya akan diselenggarakan secara bergantian (di Indonesia dan di Turki) setiap tahun, monitoring dan evaluasi program relawan *U.S. Peace Corps* di Indonesia, *capacity building*/program peningkatan kapasitas melalui sejumlah pelatihan/*training*, serta pengembangan kerja sama sejenis lainnya, yang dilaksanakan secara bilateral antara RI dengan negara lainnya di kawasan Amerika dan Eropa.

C. Isu Strategis Bidang Kerja Sama ASEAN

1) Indonesia akan berperan menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2023. Sebagai Ketua ASEAN maka Indonesia diharapkan dapat semakin memantapkan Kepimimpinannya di ASEAN melalui inisiatif kerjasama yang dapat mendukung kepentingan nasional Indonesia di tingkat regional ASEAN dan global. Untuk itu penting bagi Indonesia untuk memulai proses diskusi di tingkat nasional dan upaya pendekatan di tingkat global guna membahas *potential deliverables* dan *flagships* isu-isu yang akan menjadi inisiatif Indonesia.
2) Isu persaingan antara AS dan RRT sebagai tantangan bagi ASEAN untuk mempertahankan sentralitas dan kesatuan ASEAN dalam menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan. Dalam hal ini dipandang penting peran aktif dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN untuk mendorong pihak-pihak yang bersengketa menahan diri dan mengutamakan dialog dalam penyelesaian masalah.

3) Isu sengketa Laut China Selatan (LCS) utamanya diskusi perundingan *Code of Conduct on South China Sea* (COC) antara ASEAN dan RRT akan ditindaklanjuti melalui perundingan putaran kedua pada 2021. ASEAN dan RRT diharapkan dapat menyelesaikan perundingan COC putaran ketiga atau terakhir pada tahun 2022. Penyelesaian COC menjadi komponen penting dalam upaya Indonesia menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan ASEAN.
4) Indonesia dipandang penting untuk terus mempromosikan dan mendorong implementasi *ASEAN Outlook on Indo-Pacific* (AOIP) yang telah disepakati oleh Leaders ASEAN. Hal ini dilakukan mengingat AOIP merupakan inisiatif dan upaya Indonesia di ASEAN untuk memperkuat kerjasama pada 4 bidang kerjasama serta menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan.
5) Dampak pandemi Covid-19 masih akan mewarnai fokus kerjasama ASEAN utamanya pada aspek pemulihan ekonomi dan kerjasama penanggulangan penyakit menular di tingkat ASEAN dan kerjasama dengan Mitra Eksternal ASEAN.
6) Situasi krisis kemanusiaan di Myanmar diprediksi apabila terus berlanjut akan menimbulkan instabilitas kondisi keamanan. Dampak krisis kemanusiaan di Myanmar bersifat lintas negara/*transboundary* sehingga bisa membawa paham radikalisme, ekstremisme terorisme serta mendorong tindakan *irregular movement of persons* etnis Rohingya keluar dari wilayah Myanmar. Dalam ini penting untuk mendorong kerjasama ASEAN guna penyelesaian situasi kemanusiaan Rakhine dan *root-causes*-nya.
7) Kemenko Polhukam selaku Penanggungjawab Pilar Masyarakat Polkam ASEAN pada Setnas ASEAN-Indonesia dipandang penting untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar badan sektoral Pilar Polkam ASEAN yang diampu oleh K/L selaku *focal point*. Koordinasi dan kolaborasi dilakukan guna sinkronisasi posisi serta inisiatif Indonesia dalam forum dan badan sektoral Pilar Polkam ASEAN.
8) Isu penguatan identitas dan *awareness* masyarakat mengenai ASEAN utamanya pada Pilar Politik dan Keamanan ASEAN. Dipandang penting untuk terus menjalin kerjasama bersama dengan Pusat Studi ASEAN untuk memperkuat proses diseminasi mengenai Masyakat ASEAN di kalangan masyarakat umum dan mahasiswa.

D. Isu Strategis Bidang Kerja Sama Organisasi Internasional

1. Optimalisasi Optimalisasi Kontribusi Indonesia dalam Jajaran 10 Besar Negara Kontributor MPP PBB

   Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB 2019-2020, Indonesia terus berkomitmen dalam upaya menjaga perdamaian dan

keamanan dunia. Komitmen tersebut juga diwujudkan dengan aktif dalam pengiriman pasukan misi pemeliharaan perdamaian dunia (MPP) PBB. Saat ini Indonesia duduk dalam jajaran 10 (sepuluh) besar negara kontributor pasukan MPP PBB. Pemri terus berkomitmen untuk mengirimkan dan meningkatkan peran dalam Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB (*Peacekeeping Operations*/ PKO).

2. Aplikasi Keanggotaan Penuh *Financial Action Task Force* (FATF)
   Indonesia berkomitmen untuk mendukung rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme baik di tingkat nasional maupun global. Melalui upaya diplomasinya, pada 2015 Indonesia berhasil keluar dari daftar hitam (*public statement*) FATF, dan saat ini status Indonesia telah meningkat menjadi *observer*. Secara nasional, Indonesia telah membentuk komite koordinasi nasional anti tindak pidana pencucian uang (komite TPPU). Pemerintah Indonesia akan terus berusaha dan menyiapkan diri untuk menjadi anggota penuh FATF, dengan tujuan agar dapat berperan serta dalam menciptakan rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) pada tataran global. Indonesia telah menyusun *National Risk Assessment (NRA) 2015 Updated* yang merupakan salah satu implementasi rekomendasi FATF. Indonesia akan segera melakukan *Mutual Evaluation Review (MER)* Indonesia oleh tim assesor FATF pada periode akhir 2020, yang hasilnya diharapkan pada periode Renstra 2020-2024 ini dapat menjadi anggota penuh FTAF.

3. *Global Health Security Agenda* (GHSA)
   GHSA bertujuan memperkuat kapasitas untuk mendeteksi dan merespon wabah penyakit menular, pandemi, dan bioterorisme melalui implementasi *International Health Regulation* (IHR) 2015 yang lebih efektif. Indonesia dinilai sukses dalam memimpin GHSA selama menjadi ketua Troika GHSA. Sebagai salah satu wujud komitmen Indonesia dalam menciptakan ketahanan kesehatan global, Pemri telah mengeluarkan produk perundangan berupa Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespon Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia. Selain itu Indonesia juga telah berhasil menyusun *National Action Plan for Health Security* (NAPHS) Indonesia 2020-2024 sebagai salah satu bentuk implementasi Inpres Nomor 4 Tahun 2019.

4. Keamanan Siber
   Perkembangan teknologi dan komunikasi terus meningkat, berimplikasi pada semakin meningkatnya tantangan dan ancaman di

ranah siber. Selain itu, banyak aktor yang terlibat dalam isu keamanan siber, tidak hanya negara tetapi juga non-negara. Keterwakilan Indonesia di berbagai forum internasional membahas isu keamanan siber seperti dalam forum *United Nations Group of Governmental Experts* (UNGGE), maupun forum lainnya dirasa belum dapat mencerminkan optimalisasi kepentingan nasional di bidang siber, mengingat isu *cybersecurity* telah bergeser dari isu teknis menjadi sarat politis yang harus disikapi secara tepat, dan kuat dalam forum negosiasi di tataran global. Tantangan dan ancaman tersebut semakin pelik mengingat belum ada norma internasional yang mengatur bagaimana negara harus bertindak di ruang siber. Oleh karena itu, ke depan pembahasan untuk menyusun norma siber di tingkat global akan semakin diperlukan, meskipun dalam pelaksanaannya tidak mudah, mengingat perbedaan kepentingan negara-negara terkait isu siber.

5. Penanganan Pengungsi dalam kaitannya dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan *People Smuggling*

   Situasi konflik di sejumlah wilayah telah menimbulkan krisis kemanusiaan berkepanjangan yang mendorong semakin tingginya *irregular movement of persons* ke sejumlah negara, termasuk Indonesia. Indonesia kerap menjadi negara transit bagi para pengungsi, dan pencari suaka untuk menuju ke negara ketiga. Hal ini telah menimbulkan permasalahan di berbagai aspek, baik dari keamanan maupun sosial budaya. Sejauh ini Indonesia telah melakukan lebih dari kewajibanya dalam penanganan pengungsi dari luar negeri, mengingat Indonesia bukan negara pihak dari konvensi pengungsi. Dalam penanganan pengungsi, terutama yang terkait dengan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan *People Smuggling* Indonesia dapat memanfaatkan mekanisme *Bali Process,* dalam rangka menciptakan kerangka kerja sama yang *action oriented.* Indonesia juga perlu terus mendorong kerja sama dengan organisasi internasional termasuk UNHCR dan IOM dalam penanganan isu pengungsi. Adapun sejumlah hambatan dalam penanganan isu pengungsi seperti adanya pengurangan bantuan dari negara donor kepada para pengungsi, dan pengurangan kuota *resettlement* dari negara ketiga, serta kemudahan mendapatkan status pengungsi dari UNHCR menjadikan permasalahan pengungsi di Indonesia semakin rumit.

6. Optimalisasi Keanggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB

   Upaya pemajuan dan perlindungan HAM menjadi perhatian Indonesia. Hal tersebut terbukti dari banyaknya instrument pokok HAM internasional yang diratifikasi Indonesia sebagai wujud komitmen nyata dalam pemajuan dan perlindungan HAM. Selain itu, Indonesia

telah terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB 2020-2022. Keanggotaan tersebut juga harus dapat dioptimalkan dalam rangka mendukung pemajuan dan perlindungan serta penghargaan HAM di tingkat nasional.

7. Genetic *Resources, Traditional Knowledge, and Folklore* (GRTKF)
   Indonesia memiliki kepentingan yang besar dalam memperjuangkan pengakuan terhadap GRTKF, mengingat Indonesia merupakan negara yang majemuk dimana terdapat beragam sekali GRTKF. Indonesia memiliki kesempatan yang besar untuk bisa mendorong negara-negara berkembang lainnya yang notabene memiliki kemajemukan GRTKF seperti Indonesia. Dalam perjuangan diplomasi GRTKF Indonesia di badan PBB, yang menjadi hambatan selama ini adalah kurangnya dukungan dari negara-negara besar dalam pamajuan perlindungan GRTKF. Jika penolakan-penolakan tersebut terus terjadi, maka Indonesia perlu mencari alternatif lain, diluar dari mekanisme PBB.

9) Isu Strategis Bidang Layanan Manajemen

Dari waktu ke waktu Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri telah berusaha melaksanakan berbagai perbaikan kinerja dukungan manajemen yang ditandai dengan adanya tren peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Eselon I di lingkungan Kemenko Polhukam, serta untuk pertama kalinya melakukan survey tingkat kepuasan layanan kesekretariatan pada Tahun 2019. Namun demikian, masih banyak hal yang perlu ditingkatkan lagi dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Potensi dan Permasalahan Bidang Kerja Sama Asia, Pasifik dan Afrika

Potensi *(Opportunity)*

1) Negara-negara di Kawasan Asia, Pasifik dan Afrika memiliki kapasitas teknologi serta *best practices* yang dapat dimanfaatkan Indonesia untuk membangun dan memperkuat kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
2) Negara-negara di Kawasan Asia, Pasifik dan Afrika memiliki potensi dalam mendukung peran Indonesia di fora internasional serta mendukung kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.
3) Posisi Indonesia sebagai *honest broker* dalam hubungan internasional di kawasan Asia, Pasifik dan Afrika dapat menjadi potensi bagi Indonesia untuk meningkatkan peran sebagai salah satu negara kunci dalam menjaga keamanan serta stabilitas kawasan.

Permasalahan/Kelemahan *(Weakness)*

1) Kawasan Asia, Pasifik dan Afrika memiliki banyak isu strategis di bidang keamanan yang muncul karena perkembangan aktivitas aktor non-pemerintah seperti radikalisme, ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme, termasuk *foreign terrorist fighters* dan terorisme lintas batas, kejahatan finansial yang dilakukan untuk mendukung gerakan-gerakan radikal, ancaman kejahatan transnasional, narkoba, kejahatan siber di kawasan, dll.

2) Kerja sama dengan negara-negara di kawasan Asia, Pasifik, dan Afrika seringkali berbenturan dengan persaingan dan konflik antar-negara di kawasan.

3) Upaya dalam membangun kerja sama dengan negara-negara di Asia, Pasifik, dan Afrika dilakukan dengan sangat selektif mengingat kebutuhan dukungan anggaran yang sangat besar.

4) Keterbatasan anggaran serta proses birokrasi yang cukup panjang di masing-masing K/L dalam menindaklanjuti kebijakan menjadi hambatan internal pelaksanaan kerja sama luar negeri maupun penyelesaian permasalahan bidang politik luar negeri.

5) Masih adanya ego sektoral antar K/L yang menjadi kendala dalam koordinasi dan sinkronisasi dalam merespon tantangan ancaman keamanan di kawasan serta dalam pengembangan kerja sama bilateral dan regional bidang politik, hukum, dan keamanan dengan negara-negara di kawasan Asia, Pasifik, dan Afrika.

6) Kemampuan SDM dan infrastruktur yang masih berupaya mengimbangi perkembangan teknologi, khususnya teknologi siber dalam pencegahan dan penanganan ancaman keamanan serta kedaulatan RI akibat penyalahgunaan teknologi.

B. Potensi dan Permasalahan Bidang Kerja Sama Amerika dan Eropa

Potensi *(Opportunity)*

1) Negara-negara di Kawasan Amerika dan Eropa memiliki potensi, sumber daya, baik manusia dan materil serta *best practices* yang dapat dimanfaatkan Indonesia untuk membangun dan memperkuat kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.

2) Negara-negara di Kawasan Amerika dan Eropa memandang Indonesia memiliki peran yang besar dan kapasitas yang baik dalam menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan.

3) Negara-negara di Kawasan Amerika dan Eropa memiliki potensi dalam mendukung peran Indonesia di fora internasional serta mendukung kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.

Permasalahan/Kelemahan *(Weakness)*

1) Kerja sama dengan negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa sering kali terkendala dengan prasyarat berdasarkan standard atau nilai yang dianut negara-negara tersebut, terutama dalam konteks isu penegakan HAM, kepastian hukum, perlindungan minoritas, penegakan demokrasi dan pelestarian lingkungan hidup.
2) Upaya dalam membangun kerja sama dengan negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa perlu dilakukan dengan sangat selektif mengingat kebutuhan dukungan anggaran yang sangat besar.
3) Dalam isu tertentu, kekuatan besar (*major power*) di kawasan Amerika dan Eropa belum sepenuhnya mengakui dan menghormati kedaulatan wilayah NKRI dalam konteks batas wilayah maritim yang bersumber kepada UNCLOS 1982. Sebagai contoh, Amerika Serikat masih masih menganut kebijakan *Freedom of Navigation Program*, yang merupakan bentuk penentangan terhadap klaim negara pantai yang dinilai berlebihan.

C. Potensi dan Permasalahan Bidang Kerja Sama ASEAN

Potensi *(Opportunity)*

1) Posisi Indonesia sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2023 akan memperkuat pengaruh Indonesia dalam menyampaikan inisiatif serta *deliverables* yang sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia. Selain itu Indonesia juga diharapkan dapat men-*drive* isu serta agenda diskusi yang diangkat di forum-forum ASEAN.
2) Melalui Indonesia, ASEAN telah menyepakati ASEAN Outlook on Indi-Pacific (AOIP) pada KTT ASEAN ke-2018 di Bangkok. Diharapkan melalui mekanisme AOIP Indonesia dapat mengajak negara-negara di kawasan untuk mengindari kompetisi yang dapat memicu ketegangan di kawasan dengan semangat kerjasama guna menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di kawasan.
3) Posisi Indonesia sebagai negara non-claimant states dalam sengketa LCS menjadikan Indonesia memiliki potensi kuat untuk berperan sebagai honest broker dalam proses perundingan *Code of Conduct on South China Sea* (COC) antara ASEAN dan RRT.

Permasalahan/Kelemahan *(Weakness)*

1) Kawasan ASEAN menjadi ajang perebutan pengaruh dari negara-negara *Major Powers* di kawasan untuk menanamkan pengaruh dan memperoleh keuntungan ekonomi, hal ini menjadikan sentralitas dan kesatuan ASEAN menjadi berkurang atau terancam.

2) Dampak pandemi Covid-19 masih akan mewarnai kerjasama ASEAN akibat pembatasan perjalanan dan pertemuan utamanya pada jumlah pertemuan yang akan dilaksanakan secara tatap muka hingga vaksin Covid-19 dapat ditemukan.
3) Jumlah pertemuan-pertemuan ASEAN yang sangat banyak menjadikan banyak pertemuan ASEAN utamanya pada Pilar Polkam ASEAN yang *redundant* atau bersifat tumpang-tindih dan repetisi pembahasan isu. Untuk itu perlu dilakukan *streamlining* dan *cross-reporting* pembahasan isu antar badan sektoral utamanya pada isu-isu lintas badan sektoral dan lintas Pilar ASEAN.
4) Masih adanya ego sektoral antar K/L yang menjadi kendala dalam koordinasi dan sinkronisasi kebijakan ASEAN di tingkat nasional dan regional ASEAN.
5) Di tingkat nasional dicatat bahwa pemahaman masyarakat Indonesia mengenai ASEAN masih rendah sehingga belum mampu mengoptimalkan hasil-hasil kerjasama ASEAN untuk kepentingan masyarakat.

D. Potensi dan Permasalahan Bidang Kerja Sama Organisasi Internasional

Potensi *(Opportunity)*

1) Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengintervensi setiap kebijakan DK PBB dalam upaya pemeliharaan perdamaian;
2) Pengajuan diri Indonesia di Dewan HAM PBB menjadikan potensi besar untuk berperan aktif dan memmberikan intervensi dalam setiap pengambilan kebijakan terkait dengan pemajuan dan perlindungan HAM global.

Permasalahan/Kelemahan *(Weakness)*

a. Banyak muncul isu yang baru, terutama terkait dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi telah berdampak pada semakin beragamnya ancaman yang muncul, khususnya ancaman non-tradisional;
b. Masih adanya ego sektoral antar K/L yang menjadi kendala dalam koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kerja sama organisasi internasional;
c. Adanya ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah menimbulkan polarisasi politik internasional, termasuk di berbagai forum multilateral yang mengakibatkan semakin banyaknya kebijakan-kebijakan unilateral.

E. Potensi dan Permasalahan Bidang Layanan Manajemen

Potensi *(Opportunity)*

1) Bidang manajemen memegang peranan penting dalam sebuah unit organisasi dalam mendukung keberhasilan organisasi mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pengungkapan kinerja organisasi.
2) Selain itu juga berperan sebagai penghubung, pengingat ataupun pengevaluasi terkait urusan keuangan, kerumahtanggaan, serta persuratan.

Permasalahan/Kelemahan *(Weakness)*

1) Terbatasnya jumlah maupun kompetensi sumber daya manusia di lingkungan sekretariat
2) Masih terdapat perbedaan persepsi di lingkungan unit organisasi dalam memandang pentingnya dukungan seluruh komponen organisasi dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, reformasi birokrasi serta system pengendalian intern pemerintah.

BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1 VISI, MISI DAN TUJUAN

Sejalan dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 serta tugas dan fungsi Kemenko Polhukam yang diselaraskan dengan agenda pembangunan stabilitas politik, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan maka Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan menetapkan visi:

"Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".

Sedangkan Visi Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, yaitu :

Meningkatkan Kapasitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Dalam Rangka Mendukung Tujuan Nasional di bidang Politik Luar Negeri

Guna mewujudkan Visi tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan menetapkan Misi yang diharapkan menjadi arah pelaksanaan program dan kegiatan demi terwujudnya Visi yang telah ditetapkan, yaitu:

a. ***Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang cepat, akurat dan responsif;***
b. ***Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisian di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan; dan***
c. ***Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan.***

Sedangkan Misi Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, yaitu:

a. ***Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dalam dalam mendukung tujuan nasional di bidang politik luar negeri;***
b. ***Meningkatkan kualitas organisasi dan sumber daya manusia Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri.***

Tujuan Pembangunan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 yaitu:

1. **Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan serta Transformasi Layanan Publik**
   Indikator: Indeks Pembangunan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
2. **Kesinambungan Reformasi Birokrasi, Perbaikan *Governance*, dan Penguatan Kelembagaan**
   Indikator: Terpenuhinya Target Layanan Manajemen Kemenko Polhukam yang Optimal

Tujuan Program dan Kegiatan yang mendukung pelaksanaan pembangunan Kemenko Polhukam pada Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2020-2024 yaitu:

a. ***Mendorong Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri pada bidang politik, hukum dan keamanan;***
b. ***Meningkatkan kualitas organisasi dan sumber daya manusia Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri.***

Tujuan Program dan Kegiatan yang mendukung pelaksanaan pembangunan Kemenko Polhukam pada Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2020-2024 dicapai dengan indicator ukuran keberhasilan tujuan, yaitu :

INDIKATOR	**Ukuran Keberhasilan**	
	TARGET 2020	**TARGET 2024**
1. Indeks citra Indonesia di dunia Internasional	3.80	4.00
2. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	18	32

Visi Kemenko Polhukam Tahun 2020-2024 ini tidak terlepas dari upaya mewujudkan visi pembangunan nasional 2015-2045 yaitu "Indonesia yang berdaulat, maju, adil dan makmur" dan melaksanakan misi pembangunan nasional 2005-2025 yaitu "mewujudkan masyarakat demokratis dan menwujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu" sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembanguann Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
Melaksanakan tema dan agenda pembangunan nasional 2020-2024 yaitu "Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan" dengan agenda "Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik" sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024.

Dalam mendukung pencapaian visi misi dan tujuan Kemenko Polhukam tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri merumuskan tujuannya yaitu untuk Meningkatkan Kapasitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Dalam Rangka Mendukung Tujuan Nasional di bidang Politik Luar Negeri.

2.2 SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai tujuan Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri tersebut di atas maka disusunlah sasaran strategis beserta indikator untuk lima tahun kedepan yaitu:

Indikator Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2020 – 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Luar Negeri Lintas Sektoral yang Efektif;	1. Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Politik Luar Negeri pada K/L dilingkup Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional
	2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan yang dapat Mendukung Capaian Target Pembangunan Bidang Politik Luar Negeri dalam Dokumen Perencanaan Nasional
	3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Politik Luar Negeri yang Ditindaklanjuti
2. Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1. Nilai SAKIP
	2. Nilai PMPRB
	3. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi
	4. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Penyusunan arah kebijakan dan strategi nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode ke-4 tahun 2020-2024 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagaimana tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2007. Untuk pelaksanaannya, RPJPN 2005-2025 dibagi dalam empat tahap, yakni RPJMN ke-1 2005-2009, RPJMN ke-2 2010-2014, RPJMN ke-3 2015-2019 dan RPJMN ke-4 2020-2024. Masing-masing tahap memiliki tujuan pembangunan nasional sebagaimana terlihat sebagaimana berikut:

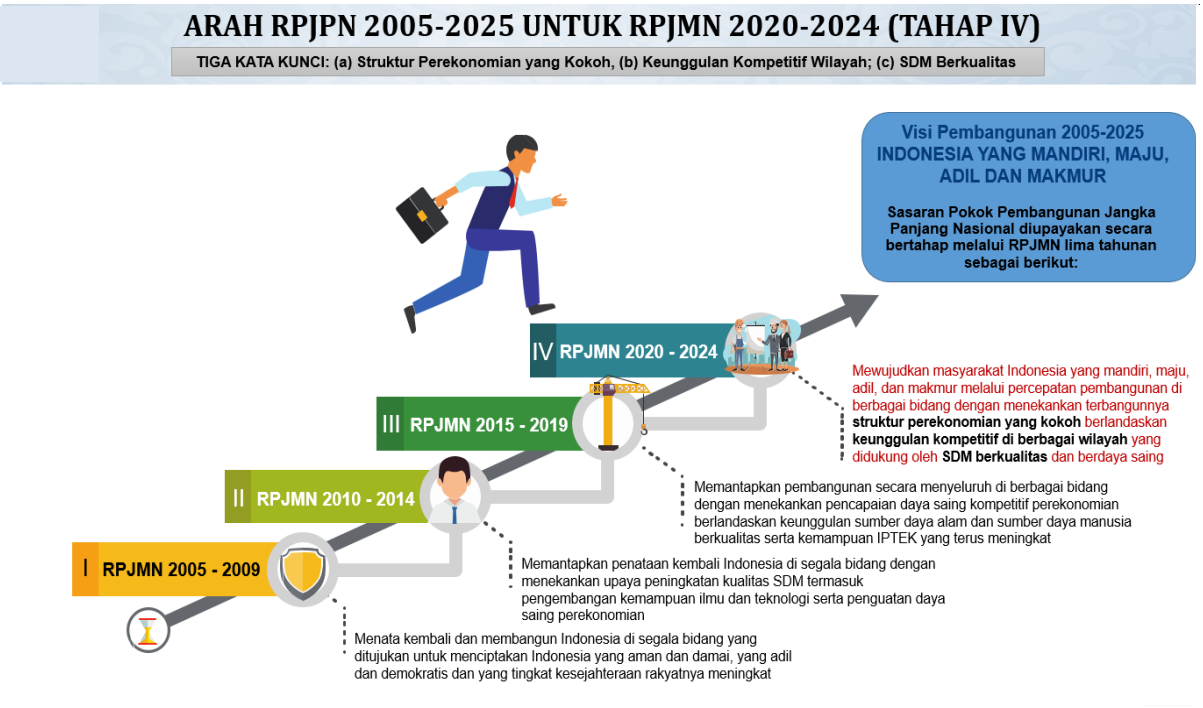

Gambar 3.1 Arah RPJPN 2005-2025

Untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir ini, terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan sebagai Prioritas Nasional:

1. Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
3. SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar

6. Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik

Selanjutnya ketujuh agenda pembangunan tersebut dijabarkan ke dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas serta Proyek Prioritas. Dalam strategi pembangunan nasional terdapat beberapa kaidah yang ditekankan, antara lain:

1) Membangun Kemandirian
   Melaksanakan pembangunan berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai dengan kondisi masyarakat, pranata social yang ada dan memanfaatkan kelebihan dan kekuatan bangsa Indonesia.
2) Menjamin Keadilan
   Keadilan adalah pembangunan dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang menjadi hak warga Negara, bersifat proporsional dan tidak melanggar hokum dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.
3) Menjaga Keberlanjutan
   Keberlanjutan adalah memastikan bahwa upaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengkompromikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri pada saatnya nanti.

Selanjutnya untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN IV tahun 2020 - 2024 telah ditetapkan 6 (enam) pengarustamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Keenam pengarustamaan (*mainstreaming*) memiliki peran yang vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat. Selain mempercepat dalam mencapai target-target dari fokus pembangunan, *mainstreaming* juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptif terhadap faktor eksternal lingkungan. Hal ini perlu dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai tujuan global. Uraian terkait pengarusutamaan disampaikan sebagai berikut:

a. Kesetaraan Gender
   Strategi pembangunan nasional harus memasukan perspektif gender untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan.
b. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
   Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam mendukung peningkatan kinerja seluruh dimensi pembangunan.

c. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan harus dapat menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

d. Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim

Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim menitikberatkan pada upaya penanganan dan pengurangan kerentanan bencana, peningkatan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim, serta upaya peningkatan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon.

e. Modal Sosial dan Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya dimaksudkan untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya dan memanfaatkan (mendayagunakan) kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.

f. Transformasi Digital

Perkembangan pesat teknologi khususnya teknologi digital telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Sehingga perlu untuk menyelaraskannya dengan pembangunan nasional.

Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi; supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia; birokrasi yang bersih dan terpercaya; rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan “kondisi perlu” untuk mendukung terlaksananya pembangunan bidang lainnya.

Beberapa isu domestik yang perlu diantisipasi selama lima tahun mendatang adalah intoleransi, demokrasi prosedural, kompleksitas pelayanan birokrasi dan penegakan hukum, perilaku koruptif, potensi ancaman keamanan dan kedaulatan negara.

Pada tingkat global, isu yang perlu menjadi perhatian adalah depolarisasi gravitasi politik internasional, pergeseran arena pertarungan negara besar ke arena maritim, deglobalisasi dan populisme yang menyebabkan kebijakan unilateral beberapa negara, dan instabilitas di kawasan Timur Tengah.

Arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam terfokus pada 5 (lima) bidang sebagai Program Prioritas yaitu **Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Pemantapan Sistem Hukum**

Nasional, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, serta Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional.

Arah kebijakan dan strategi pada Program Prioritas Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri secara nasional antara lain:

1. Memperkuat Integritas Wilayah NKRI dan Perlindungan WNI Di Luar Negeri melalui:
   a. Peningkatan dan intensifikasi efektivitas penyelesaian perbatasan dan percepatan pemetaan batas negara;
   b. Pembangunan norma dan hukum internasional dalam melindungi kedaulatan Indonesia;
   c. Peningkatan kerja sama internasional dalam pencegahan dan penanganan kejahatan trans-nasional;
   d. Penguatan pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di tingkat bilateral, regional, dan multilateral serta meningkatkan upaya pencegahan terjadinya masalah WNI di luar negeri;
   e. Penguatan peran serta aktor non-pemerintah dalam melakukan perlindungan kepada WNI.
2. Memperkuat Kerjasama Pembangunan Internasional melalui:
   a. Peningkatan penggunaan sumber-sumber dan mekanisme pendanaan baru;
   b. Penciptaan lingkungan yang mendukung peningkatan partisipasi swasta dalam kerjasama pembangunan internasional;
   c. Penguatan KSST untuk mendukung perdagangan dan investasi;
   d. Pembentukan lembaga pemberi bantuan dan kerjasama pembangunan internasional.
3. Meningkatkan Citra Positif Indonesia di Dunia Internasional melalui:
   a. Penyusunan kebijakan diplomasi publik Indonesia untuk meningkatkan koordinasi di tingkat nasional;
   b. Peningkatan peran-serta aktor non-pemerintah dalam diplomasi publik yang inklusif.
4. Meningkatkan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global melalui:
   a. Peningkatan inisiasi/ posisi Indonesia yang diterima di tingkat regional dan global
   b. Peningkatan peran aktif Indonesia dalam perdamaian dunia
   c. Peningkatan koordinasi di dalam negeri untuk melaksanakan komitmen internasional
   d. Penataan peran, struktur, sdm dan fungsi K/L dalam melaksanakan kebijakan luar negeri Indonesia

3.2 PRIORITAS NASIONAL KEMENKO POLHUKAM DALAM MENGAWAL ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Dalam mengawal arah kebijakan dan staretegi nasional, Kemenko Polhukam mengawal dua Prioritas Nasional yakni **Penguatan Gerakan Indonesia Tertib dan pengawalan Penegakan Hukum Nasional melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI)** sebagai upaya terciptanya stabilitas bidang politik, hukum, keamanan dan transformasi pelayanan publik.

3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK LUAR NEGERI

Dalam mendukung capaian prioritas nasional Kemenko Polhukam, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri merumuskan arah kebijakan khususnya pada Program Prioritas Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri. Dinamika geopolitik global berpengaruh terhadap masa depan pembangunan Indonesia. Persaingan antar kekuatan besar dunia menimbulkan depolarisasi pusat geopolitik baik di Barat (Amerika dan Eropa) maupun di kawasan Timur (Asia). Selain itu, terdapat dinamika geopolitik berupa sengketa Laut Tiongkok Selatan (LTS). Klaim dan ekspansi militer Tiongkok di LTS meningkatkan ketegangan di kawasan. Amerika Serikat (AS) merespons Tiongkok dengan menggelar kekuatannya di LTS. ASEAN telah mengupayakan pembentukan Code of Conduct (CoC) untuk menyelesaikan permasalahan ini tetapi pada prosesnya menemui hambatan.

Mudahnya pergerakan aktor non negara secara trans-nasional membuat dinamika ancaman non tradisional menjadi isu strategis bagi Indonesia. Ancaman non tradisional yang mendapat perhatian besar adalah: (1) Terorisme; (2) Perdagangan manusia, khususnya pada perempuan dan anak Indonesia yang rentan menjadi korban perdagangan manusia; (3) Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, terutama dengan makin intensnya penyelundupan narkotika ke Indonesia; (4) illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing yang sering terjadi di wilayah laut Indonesia; dan (5) Keamanan siber.

Sementara itu, isu lain yang perlu menjadi perhatian Indonesia adalah melemahnya multilateralisme dan populisme. Kedua isu ini berdampak pada pelemahan tata kelola global, yang mendorong negara-negara cenderung mengeluarkan kebijakan unilateral.

Adapun arah kebijakan dan strategi Kemenko Polhukam, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri pada Tahun 2020 – 2024 khususnya pada Program Prioritas Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri yang disusun secara komprehensif dan inklusif dengan berpedoman pada arah kebijakan dan

strategi nasional serta menjawab potensi dan permasalahan bidang politik, hukum, dan keamanan selama 5 tahun kedepan antara lain:

a. Meningkatkan peran Indonesia dalam Forum Internasional tingkat regional dan global
b. Sinergitas lintas sektoral kebijakan diplomasi Indonesia
c. Penguatan Peran Pemerintah dan non-Pemerintah dalam melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri
d. Meningkatkan inisiatif Indonesia pada forum internasional dalam menjaga citra positif Indonesia

3.4 KERANGKA REGULASI

Kebutuhan regulasi pada Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 khususnya pada Program Prioritas Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri adalah:

a. Revisi UU Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
b. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

3.5 KERANGKA KELEMBAGAAN

Pembentukan Kementerian Kabinet Indonesia Maju dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia maju Periode Tahun 2019-2024 pada tanggal 23 Oktober 2019 yang diikuti dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara. Adapun pembentukan Organisasi dari kedua dasar tesebut diikuti dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; sedangkan susunan struktur dan organisasi masih sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, Deputi Bidang Koordinasi dibantu oleh:

A. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terdiri dari:
   a. Sekretariat Deputi;
   b. Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Asia, Pasifik, dan Afrika;
   c. Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa;
   d. Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama ASEAN;
   e. Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Organisasi Internasional;
B. Jabatan Administrator terdiri dari:
   a. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum

b. Kepala Bagian Program dan Evaluasi
c. Kepala Bidang Kerja Sama Bilateral Asia dan Pasifik
d. Kepala Bidang Kerja Sama Bilateral Afrika dan Timur Tengah
e. Kepala Bidang Kerja Sama Bilateral Amerika
f. Kepala Bidang Kerja Sama Bilateral Eropa
g. Kepala Bidang Politik dan Pertahanan ASEAN
h. Kepala Bidang Hukum, Keamanan dan HAM ASEAN
i. Kepala Bidang Politik, Keamanan dan Pertahanan Internasional
j. Kepala Bidang Hukum, HAM dan Kemanusiaan Internasional

C. Jabatan Pengawas terdiri dari:
a. Kepala Subbagian Tata Usaha
b. Kepala Subbagian Umum
c. Kepala Subbagian Penyusunan Program
d. Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi

D. Jabatan Pelaksana terdiri dari:
a. Analis Tata Usaha
b. Analis Bidang Politik Luar Negeri
c. Penata Naskah Dinas
d. Pengadministrasi Umum

E. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri terdiri dari:
a. Staf Umum
b. Pengemudi

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1.2 INDIKATOR KINERJA, TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Program Prioritas Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri dijabarkan menjadi Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN 2020-2025 sebagaimana berikut:

Gambar 4.1: Program Prioritas dan Proyek Prioritas Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri

Dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri maka ditetapkan sasaran, target, dan indikator sebagai berikut**:**

NO	SASARAN / ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR	TARGET 2020	TARGET 2024
(Menguatnya Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik)				
1	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	1. Indeks Kemajuan Perlindungan Penyelesaian Perbatasan Maritim	32.09.00	72.42.00
		2. Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri	86	90
		3. Jumlah program/kegiatan Kerjasama Selatan - selatan dan Triangular	96	240

NO	SASARAN / ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR	TARGET 2020	TARGET 2024
		4. Jumlah pendanaan kegiatan kerja sama pembangunan internasional termasuk KSST	Rp.16.6 Miliar	Rp.293 Miliar
		5. Tingkat partisipasi actor non pemerintah dalam kegiatan kerjasama pembangunan internasional	2.2-2.38%	2.96-3.16%
		6. Indeks citra Indonesia di dunia Internasional	3.80	4.00
		7. Jumlah forum yang dipimpin oleh Indonesia pada tingkat regional dan multilateral	10	16

Gambar 4.2 : Sasaran, Indikator dan Target Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri

Untuk mencapai sasaran yang dimaksud Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target 5 tahun ke depan sebagai berikut:

	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Baseline	Tahun			
		2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Strategis (SS 1)	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Luar Negeri Lintas Sektoral yang Efektif					
Indikator Kinerja (IK 1)	Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Politik Luar Negeri pada K/L dilingkup Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional	85%	87%	90%	92%	95%
Indikator Kinerja (IK1.1)	Persentase Capaian Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional	85%	87%	90%	92%	95%
Indikator Kinerja (IK1.2)	Persentase Capaian Jumlah Forum yang Dipimpin Indonesia pada Tingkat Regional dan Multilateral	85%	87%	90%	92%	95%
Indikator Kinerja (IK 2)	Persentase Rekomendasi Kebijakan yang Dapat Mendukung Capaian Target Pembangunan Bidang Politik Luar Negeri dalam Dokumen Perencanaan Nasional	85%	87%	90%	92%	95%
Indikator Kinerja (IK 3)	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Politik Luar Negeri yang Ditindaklanjuti	85%	87%	90%	92%	95%

	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Baseline	Tahun			
		2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Strategis (SS 2)	Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal					
Indikator Kinerja (IK2.1)	Nilai SAKIP	BB	BB	A	A	A
Indikator Kinerja (IK2.2)	Nilai PMPRB	28	29	30	31	32
Indikator Kinerja (IK2.3)	Indeks Kwpuasan Layanan Sekretariat Deputi	4	4	4	4	4
Indikator Kinerja (IK2.4)	Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	80	85	87	90	95

Gambar 4.3 : Indikator Kinerja Utama Unit Es. I Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2020 – 2024 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja program, indikator kinerja kegiatan dan kerangka pendanaan dari masing- masing program dan kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dalam kurun waktu 2020 – 2024 termuat dalam lampiran Renstra Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri.

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan mengakomodasi program dan kegiatan yang bersumber dari kebijakan Presiden, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Arah dan Kebijakan Presiden, dan Program Prioritas Bidang Polhukam.

Lingkup materi Rencana Strategis ini mencakup analisis lingkungan strategis, potensi, permasalahan dan tantangan, kelemahan serta peluang yang dihadapi oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, dan identifikasi berbagai permasalahan lainnya yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Perumusan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sejalan dengan agenda nasional Kabinet Indonesia Maju Demikian juga, arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut diatas dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang kesemuanya sejalan dengan upaya perwujudan visi dan misi Presiden.

Rencana Strategis ini berbeda dengan Rencana Strategis sebelumnya, karena memuat program dan kegiatan yang telah disesuaikan dengan acuan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengenai Restrukturisasi Penyusunan Program dan Kegiatan, dengan tujuan untuk menciptakan institusi pemerintah yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada kinerja yang terukur (hasil/outcome). Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri ini diharapkan dapat mewujudkan keselarasan pedoman, persepsi, pemahaman program dan kegiatan, pola tindak dan pola kerja antar Kementerian/Lembaga dibawah koordinasi Kemenko Polhukam dan Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam.

Jakarta, Januari 2020
Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri,

Lutfi Rauf

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri
2. Matriks Target Kinerja dan Pendanaan Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2020 – 2024

Lampiran 1 : Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri

STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK LUAR NEGERI

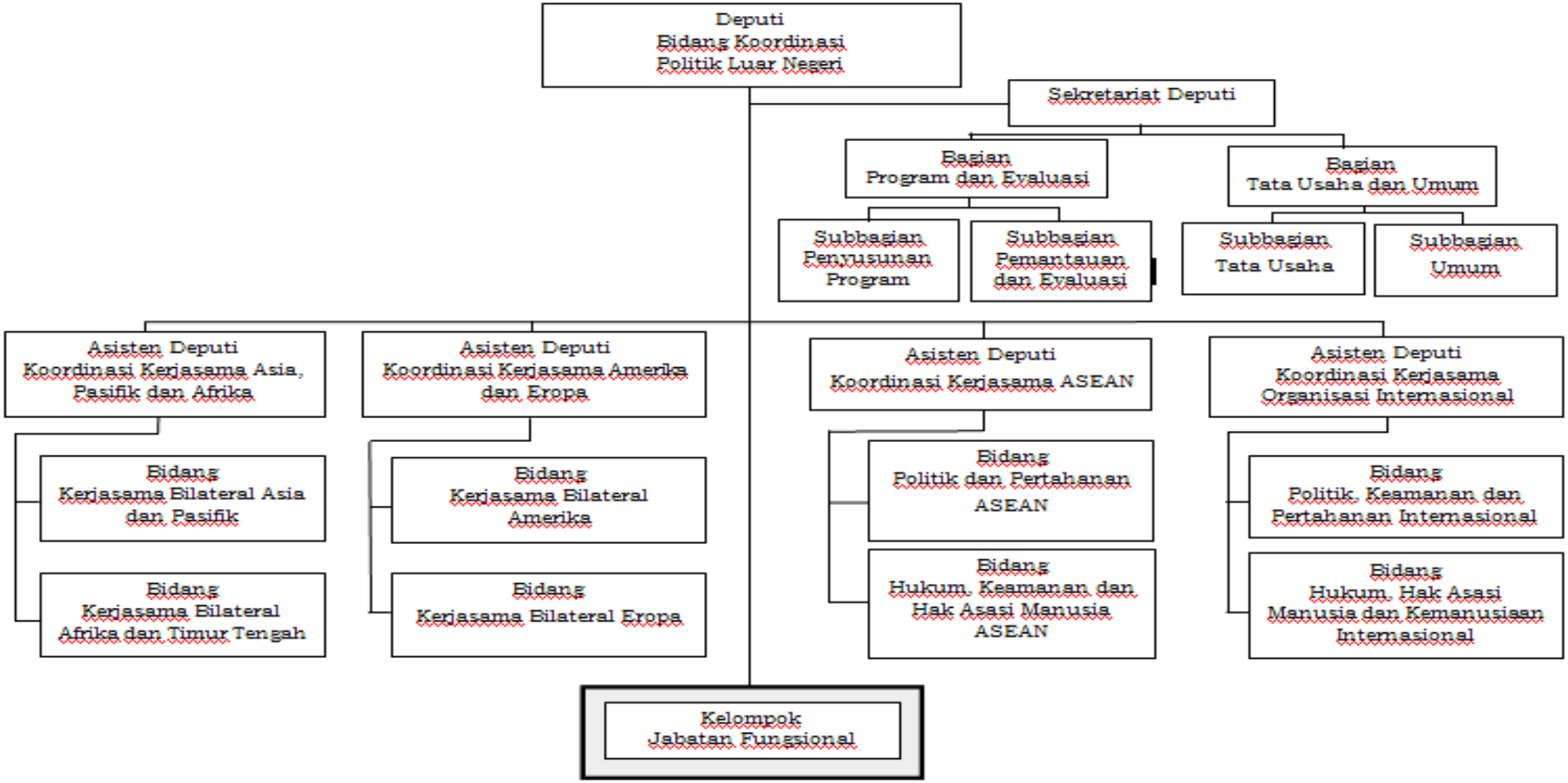

Lampiran 2: Matriks Target Kinerja dan Pendanaan Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2020 – 2024

MATRIKS TARGET KINERJA DAN PENDANAAN
RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK LUAR NEGERI TAHUN 2020 - 2024

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA					ALOKASI DANA					PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri								10,828,555	11,153,412	11,488,014	11,832,654	12,187,634	Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Bidang Politik Luar Negeri Lintas Sektor yang Efektif												
		Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Politik Luar Negeri pada K/L di Bawah Koordinasi Kemenko Polhukam Sesuai Dengan Dokumen Perencanaan Nasional	85%	87%	90%	92%	95%						
		Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan yang Dapat Mendukung Capaian Target Bidang Politik Luar Negeri Dalam Dokumen Perencanaan Nasional	85%	87%	90%	92%	95%						
		Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Politik Luar Negeri yang Ditindaklanjuti	85%	87%	90%	92%	95%						
	Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal												
		Nilai SAKIP	BB	BB	A	A	A						
		Nilai PMPRB	28	29	30	31	32						
		Indeks kepuasan Pelayanan Sekretariat	4	4	4	4	4						
		Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja	85	87	90	92	95						
Koordinasi Bidang Kerja Sama Amerika dan Eropa								2,424,144	2,496,868	2,571,774	2,648,928	2,728,395	Asdep Bidang Kerja Sama Amerika dan Eropa
	Penyelesaian Permasalahan Bidang Kerja Sama Amerik dan Eropa Lintas Sektoral yang Efektif												

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA					ALOKASI DANA					PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang	4	4	5	5	5						
		Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan	90	93	95	96	98						
		Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan	80	83	85	90	95						
Koordinasi Bidang Kerja Sama ASEAN								2,635,874	2,714,950	2,796,399	2,880,291	2,966,699	Asdep Bidang Kerja Sama ASEAN
	Penyelesaian Permasalahan Bidang Kerja Sama ASEAN Lintas Sektoral yang Efektif												
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang	4	4	5	5	5						
		Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan	75	80	85	90	95						
		Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan	75	80	85	90	95						
Koordinasi Bidang Kerja Sama Asia, Pasifik dan Afrika								2,578,785	2,656,149	2,735,833	2,817,908	2,902,445	Asdep Bidang Kerja Sama Asia, Pasifik dan Afrika
	Penyelesaian Permasalahan Bidang Kerja Sama Asia, Pasifik dan Afrika Lintas Sektoral yang Efektif												
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang	5	5	6	6	6						
		Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan	85	87	90	98	98						
		Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan	85	87	90	95	98						
Koordinasi Bidang Kerja Sama Organisasi Internasional								1,689,752	1,740,445	1,792,658	1,846,438	1,901,831	Asdep Bidang Kerja Sama Organisasi Internasional
	Penyelesaian Permasalahan Bidang Kerja Sama Asia, Pasifik dan Afrika Lintas Sektoral yang Efektif												
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang	2	3	3	4	4						
		Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan	100	100	100	100	100						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA					ALOKASI DANA					PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan	100	100	100	100	100						
Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri								1,500,000	1,545,000	1,591,350	1,639,091	1,688,263	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri
	Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal												
		Nilai SAKIP	BB	BB	A	A	A						
		Nilai Zona Integritas	60	63	66	69	70						
		Nilai PMPRB	28	29	30	31	32						
		Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat	4	4	4	4	4						
		Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja	80	87	85	90	95						